

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat peneliti temukan. Yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwasannya penggunaan basis akuntansi dalam laporan keuangan yang harus disajikan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus menggunakan basis akrual serta laporan keuangan yang disajikan terdiri terdiri dari 7 macam, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010 yakni basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual serta laporan keuangan yang disajikan terdiri dari 7 laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan ditemukan bahwa dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang disusun oleh BPKAD Kabupaten Kuningan untuk tahun anggaran 2021 pada praktiknya telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual serta laporan keuangan yang disajikan terdiri dari 7 laporan keuangan dengan format penyajian sebagaimana yang terlampir dalam PP 71 tahun 2010.

4. Dalam proses penyajian laporan keuangan, BPKAD Kabupaten Kuningan mengalami beberapa kendala diantaranya: kurangnya kompetensi sumber daya aparatur paa tiap SKPD dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010, masih terdapat beberapa SKPD yang lamban dalam mengumpulkan data-data laporan keuangan, aplikasi keuangan yang belum dapat digunakan sepenuhnya dalam modul pelaporan, dan kurangnya jumlah tenaga IT sebagai administrator aplikasi keuangan.
5. Beberapa strategi yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kuningan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kendala penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual PP 71 tahun 2010 adalah: peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan SKPD Kabupaten Kuningan, melakukan koordinasi secara konsisten terkait percepatan pengumpulan data-data untuk penyusunan LKPD, melakukan konsultasi dengan pihak konsultan aplikasi SIPKD 90 terkait kendala aplikasi, serta melakukan pembagian waktu pekerjaan dan mengajukan penambahan pegawai IT kepada pimpinan terkait.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang akan penulis sampaikan sebagai bentuk hasil dari penelitian ini serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah:

1. Pihak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kuningan harus lebih memahami terkait tata cara dan alur penyusunan laporan keuangan dan sistem akuntansi dikarenakan masih adanya beberapa SDM yang belum memahaminya dengan baik dan cekatan agar kendala-kendala yang dihadapi tersebut tidak akan muncul kembali dalam penyajian laporan keuangan tahun berikutnya.
2. Pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kuningan hendaknya menyediakan jumlah SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kerja yang dibebankan sehingga aktivitas lembaga dapat berjalan dengan baik dan selesai

tepat pada waktunya dengan tidak memberikan beban secara berlebihan kepada para pegawainya.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih memperluas ruang lingkup penelitian dengan fokus penelitian menggunakan tahun anggaran yang lebih banyak lagi serta peraturan standar akuntansi pemerintahan yang dibahas dapat lebih luas lagi.

